

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Cogen, Bruce J., *Sosiologi Suatu Pengantar*, Terjemahan oleh Simarona Sahat, (Jakarta: Rineke Cipta, 1992).

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Halim, Abdul dan Theresia Damayanti, *Teori dan Metode Pengawasan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007).

Kabul, Imam, *Dinamika Hukum Informasi*, (Jakarta: Nirmala Media, 2007)

Khatarina, Josi, dkk, *Tanya Jawab Standar Layanan Informasi Publik*, (Jakarta: Kreasi Agung Abadi, 2010).

Komisi Informasi Pusat, *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat*, (Jakarta: Komisi Informasi Pusat, 2016).

Poerwardaminto, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).

Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*, (Bandung: Refika Aditama, 2013).

Situmorang, Victor dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008).

Suteki dan Galang Taufani, *Motodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo, 2020).

Torang, Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Layanan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

## **Jurnal**

Bhudianto, Wahyu, *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Transformasi Vol. 1, No. 29, 2016.

DW, Aditya Satrio, Priyanto Harsasto, dan Neny Marlina, *Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di Jawa Tengah*, Journal of Politic and Govenrment Studies Vol. 6, No. 01, Desember 2016.

Helmi, Rahmadhona Fitri, *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat*, Journal of Education on Social Science Vol. 3, No. 1, April 2019.

Rahman, Shaila dan Tamanna Bahar, *COVID-19: The New Threat*, International Journal of Infection Vol. 7, No. 01, Januari 2020.

Rifai, Akhmad, *Kemerdekaan Informasi: Catatan atas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Dakwah Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2020.

Solehah, Nihlatul dan Cindy Aprianjani, *Peran Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di Bangka Belitung*, Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 1, No. 1, April 2019.

Sudibyo, Agus dalam Sarafina Shinta Dewi, *Peran Komisi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9, No. 3, Oktober, 2012.

Susilo, Adityo, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7, No. 1, April 2020.

Wahid, Abdul, *Quick Count: Hak Atas Informasi atau Pembohongan Publik*, Jurnal Konstitusi Vol. 6, No. 3, September 2009.

Wibawa, Kadek Cahya Susila, *Peran Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Kedaruratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19*, Administrative Law & Governance Journal Vol. 3, No. 3, September 2020.

\_\_\_\_\_, *Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Administrative Law & Governance Journal Vol. 2, No. 2, Juni 2019.

Zamzami, Abid, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Yurispruden Vol. 3, No. 2, Juni 2020.

## **Tesis**

Wibawa, Herry, *Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan (Studi Perbandingan dengan Pengawasan PERATUN)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.

## **Internet**

Dwianto, Achman Reyhan, *DKI-Jateng Tertinggi, Ini 5 Provinsi Kasus Baru Covid-19* Terbanyak 4 Oktober diakses dari

[https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5199442/dki-jateng-tertinggi-ini-5-provinsi-kasus -baru-covid-19-terbanyak-4-oktober](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5199442/dki-jateng-tertinggi-ini-5-provinsi-kasus-baru-covid-19-terbanyak-4-oktober) pada Senin, 5 Oktober 2020.

Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah, *Tentang KIP Jateng* diakses dari <https://kipjateng.jetengprov.go.id/profil/tentang-kip-jateng/> pada Senin, 5 Oktober 2020.

Tanggap Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, *Statistik Kasus Covid-19 Jawa Tengah* diakses dari <https://corona.jatengprov.go.id/data> pada Senin, 5 Oktober 2020.

Tim Detikcom, Jadi Klaster Terbesar, 3 Perusahaan Sebarkan Corona Ke Ratusan Warga Semarang diakses dari [https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5089253/jadi-klaster-terbesar-3-perusahaan-sebarkan-corona-ke-ratusan-warga semarang](https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5089253/jadi-klaster-terbesar-3-perusahaan-sebarkan-corona-ke-ratusan-warga-semarang) pada Jumat, 9 Oktober 2020.